

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (E-SAKIP) DI KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC POLICY FOR GOVERNMENT AGENCY PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM (E-SAKIP) IN GUBENG DISTRICT, SURABAYA CITY

Erlang Virdiansyah¹

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya, Jawa Timur

E-mail: erlangviran@gmail.com

Abstrak: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah salah satu wujud prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Setiap instansi pemerintahan diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menekan tingkat korupsi yang terjadi. Selain itu, di era yang serba teknologi ini menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dengan cara melakukan reformasi birokrasi. Perubahan SAKIP menjadi e-SAKIP merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi di Instansi pemerintahan sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya dalam pertanggungjawaban terhadap kinerja suatu instansi pemerintahan. Maka dari itu, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk dapat menunjukkan keberhasilan dari pelaksanaan e-SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya khususnya di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini dilakukan melalui beberapa cara mulai dari wawancara dengan pegawai yang berwenang, observasi secara langsung di Kecamatan Gubeng serta studi kepustakaan pada dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Temuan pada hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan akan penerapan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dengan dukungan dengan adanya komunikasi yang berjalan dengan baik, dukungan sumberdaya manusia hingga finansial yang memadai, serta adanya disposisi dan struktur organisasi yang tepat dalam pelaksanaannya. Selain itu, hasil evaluasi akan akuntabilitas kinerja Kecamatan Gubeng juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Penerapan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng menjadi salah satu perangkat daerah yang berhasil mengimplementasikan kebijakn e-SAKIP dengan baik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sehingga perlu dipertahankan bahkan terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; E-SAKIP; Reformasi Birokrasi

Abstract: The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is a manifestation of the principles of good governance. It is hoped that every government agency can run well so that it can reduce the level of corruption that occurs. Apart from that, in this technological era, there is a need for more effective and efficient government administration by carrying out bureaucratic reform. The change from SAKIP to e-SAKIP is one of the efforts to reform bureaucracy in government agencies so that it can increase the effectiveness and efficiency of administering government affairs, especially in accountability for the performance of a government agency. Therefore, the aim of this research is to show the success of implementing e-SAKIP within the Surabaya City Government, especially in Gubeng District, Surabaya City. This research using descriptive qualitative methods was carried out in several ways starting from interviews with authorized employees, direct observation in Gubeng District and literature study of documents relevant to the research topic. The findings of this research show the success of implementing e-SAKIP in Gubeng District, Surabaya City with the support of good communication, adequate human and financial resource support, as well as the right disposition and organizational structure in its implementation. Apart from that, the results of the evaluation of performance accountability in Gubeng District also showed very satisfying results. The implementation of e-SAKIP in Gubeng District is one of the regional instruments that has succeeded in implementing the e-SAKIP policy well within the Surabaya City Government, so it needs to be maintained and even continuously improved.

Keywords: Accountability; E-SAKIP; Bureaucratic Reform.

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dalam pelayanan publik merupakan salah satu faktor terpenting dalam upaya menjamin pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* didasarkan dengan adanya rasa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan yang telah dipercaya sebagai inisiator pada kepentingan publik (Saputra et al., 2017). Menurut Gregory (2003) dalam (Lestari & Valiant Salomo, 2022), akuntabilitas merupakan sebuah konsep dalam mempertanggungjawabkan kinerja melalui pelaporan akan tindakan yang telah dikelola oleh suatu organisasi. Dalam organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah mencerminkan seberapa jauh tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh instansi pemerintahan bisa tercapai. Hasil kinerja pemerintah juga menunjukkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pemerintah dalam upaya mengimplementasikan program dan kebijakan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, bahwasannya kinerja pada instansi pemerintahan merupakan cerminan dari tingkat pencapaian tujuan maupun sasaran yang dirumuskan atau telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2005.

Pemerintahan yang baik dapat diketahui melalui tingkat kinerja yang tinggi, akuntabilitas publik, transparansi, penyelenggaraan yang efektif dan efisien, serta bersih dari tindakan KKN yang meliputi korupsi, kolusi dan nepotisme (Pratiwi et al., 2022). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, terdapat kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan pada pemerintahan Indonesia. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Setiap instansi pemerintahan wajib memeprtanggungjawabkan tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk akuntabilitas instansi

pemerintahan di Indoensia yaitu adanya SAKIP.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjelaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisar dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintahan. Melalui SAKIP, sebuah instansi pemerintahan dapat mengelola sumber daya lebih efisien, dapat mengukur pencapaian kinerja, serta dapat memberikan pertanggungjawaban akan kinerjanya kepada publik. Dalam upaya reformasi birokrasi, SAKIP telah mengalami transformasi ke dalam bentuk elektronik yang disebut e-SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik. E-SAKIP adalah sebuah sistem informasi berbasis website yang memfasilitasi dalam pengelolaan SAKIP.

SAKIP menghasilkan output berupa LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas kinerja pemerintahan (Pebriani Wahyu et al., 2023). Munculnya e-SAKIP dapat membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun LAKIP (Radinda & Saleh, 2021). Isi dari LAKIP berupa laporan pertanggungjawaban mengenai tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran di suatu instansi pemerintah. Selanjutnya, pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan pemberian peringkat mulai AA sampai dengan D. Hal ini sudah dijelaskan dalam Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.

Tabel 1. Standar Penilaian Pelapaoran
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Kategori	Nilai Angka	Keterangan
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Permenpan RB No. 12 Tahun 2015

Penerapan E-SAKIP khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah diimplementasikan mulai tahun 2018 sampai saat ini dan terus dikembangkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Terkait hal ini, setiap instansi pemerintah Kota Surabaya termasuk Kecamatan Gubeng telah mengalokasikan dana untuk mendukung penerapan aplikasi e-SAKIP. Oleh karena itu, salah satu hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan manajemen kinerja yaitu adanya pengukuran kinerja dengan tujuan untuk menjamin peningkatan pada pelayanan publik serta peningkatan akuntabilitas dengan mencapai output serta outcome yang diharapkan, sehingga memudahkan dalam terwujudnya organisasi yang akuntabel (Anastasia Jacobus et al., 2023). Kecamatan Gubeng merupakan kecamatan yang berlokasi di pusat kota Surabaya. Dengan luas wilayah sekitar 7,89 km persegi dan

jumlah penduduk lebih dari 148 ribu jiwa, Kecamatan Gubeng memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyediaan layanan publik di Kota Surabaya. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang lebih baik oleh pemerintah selalu menjadi tuntutan yang banyak diharapkan masyarakat. Maka dari itu, peningkatan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah menjadi hal yang sangat penting hingga membutuhkan perhatian lebih sampai tidak bisa diabaikan begitu saja. Inisiatif dan komitmen Kecamatan Gubeng dalam menerapkan e- Sakip menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Gubeng. Dengan adanya e-SAKIP, Kecamatan Gubeng berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan, dan memastikan pencapaian target kinerja organisasi telah sesuai dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan.

Penerapan sistem E-SAKIP di Kecamatan Gubeng tentunya dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, serta konsekuensi yang dihasilkan dari implementasi e-SAKIP. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini dapat diketahui lebih lanjut tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mewujudkan good governance. Faktor-faktor yang mendukung implementasi e- SAKIP di Kecamatan Gubeng mencakup komitmen yang kuat dari pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta dukungan dari para pemangku kepentingan terkait. Namun, terdapat pula faktor-faktor penghambat seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari e- SAKIP yang dapat menjadi tantangan dalam penerapan sistem ini. Dengan mengungkap faktor-faktor pendukung, penghambat, serta konsekuensi dari implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng diharapkan dapat diperoleh saran- saran yang sesuai untuk mendukung penerapan sistem tersebut secara lebih efektif di masa mendatang.

Situasi dan tantangan yang disebutkan sebelumnya menjadi pendukung utama pada penelitian terkait “Implementasi Kebijakan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya”. Peneliti menggunakan teori implementasi dari Edward III yang meliputi aspek-aspek berikut : (1) komunikasi, secara efektif adalah suatu keharusan bagi pelaksana program kebijakan ketika mereka berinteraksi dengan kelompok sasaran, yaitu Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Dengan membuka saluran komunikasi yang baik, hal ini akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam menetapkan sistem yang dimaksud. Komunikasi yang jelas dan terbuka menjadi kunci agar program kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan lancar di wilayah tersebut. (2) Sumberdaya, merupakan faktor kunci dalam mengimplementasikan suatu sistem guna mencapai sasaran yang diinginkan. Implementor atau pelaksana yang kompeten dan andal mampu mengartikan hal-hal yang dibutuhkan terkait sistem e-SAKIP, terutama jika dapat dukung sumber daya finansial yang memadai. Penerapan e- SAKIP ini memerlukan sumber daya yang cukup tinggi untuk dapat diimplementasikan sehingga ketersediaan dana menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan implementasinya.

(3) Disposisi, dalam penerapan sistem e-SAKIP guna meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dalam instansi pemerintahan dibutuhkan karakter khusus dari para pelaksana kebijakan. Karakteristik yang dimaksud meliputi kejujuran, komitmen yang kuat, serta sikap demokratis. Kejujuran diperlukan agar implementasi berjalan dengan transparan dan akuntabel. Komitmen yang tinggi dari implementor akan mendorong keberhasilan pelaksanaan secara konsisten. Sedangkan sikap demokratis memungkinkan adanya keterlibatan dan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan proses pelaksanaan e-SAKIP sebagai upaya peningkatan kinerja sumber daya aparatur dalam sebuah instansi pemerintahan. (4)

Struktur birokrasi, Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Unit Pelaksana Program (UPP) Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya perlu memiliki pemahaman yang mendalam terkait sistem e-SAKIP. Hal ini penting karena mekanisme dan instruksi organisasi dalam sistem tersebut menjadi tolak ukur pelaksanaannya melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan memahami sistem ini secara baik, para ASN dapat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur baku yang ada, sehingga implementasi sistem e- SAKIP dapat berjalan efektif dan optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengkaji serta menganalisis implementasi kebijakan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dengan mengkaji implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang telah memengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dari penerapan sistem tersebut. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi instansi pemerintah lain yang berencana mengembangkan sistem e-SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi. Meski demikian, implementasi e-SAKIP di berbagai instansi pemerintah menghadapi tantangan dan kendala yang beragam, baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, maupun budaya organisasi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi pengetahuan yang bermanfaat dalam perumusan kebijakan dan implementasi e-SAKIP. Selain itu, temuan pada penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah sumber informasi untuk para praktisi atau pelaku di lapangan, yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan dalam menghadapi tantangan-tantangan serupa yang mungkin dihadapi saat menerapkan sistem e-SAKIP atau sistem serupa lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan berfokus dalam memperoleh pemahaman secara mendalam tentang sebuah fenomena atau topik melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat naratif dan deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada mengkaji penerapan atau pelaksanaan kebijakan sebagai upaya dalam memberikan deskripsi secara rinci dan mendalam tentang implementasi sistem informasi elektronik yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah yaitu E-SAKIP.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III untuk menganalisis implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng, yang mengemukakan empat faktor utama dalam mendukung keberhasilan penerapan kebijakan yang meliputi: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi atau sikap pelaksana, dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat faktor ini digunakan sebagai landasan untuk memahami dan menjelaskan proses implementasi e-SAKIP secara komprehensif. Studi ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Kecamatan Gubeng. Dalam memilih narasumber atau informan penelitian, proses dilakukan di lingkungan Kecamatan Gubeng tersebut. Informan yang dipilih merupakan para pegawai yang memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian yaitu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng. Dengan memilih informan yang tepat dan berpengetahuan, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang kaya dan mendalam terkait penerapan e-SAKIP di instansi pemerintah tingkat kecamatan tersebut.

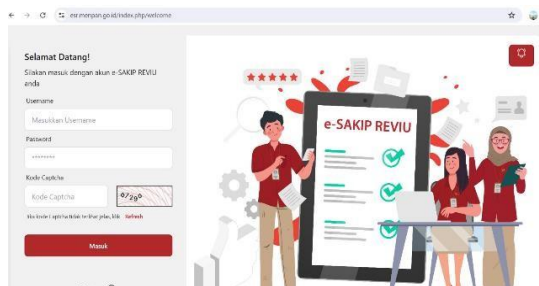
HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas pemerintah merupakan hal penting dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintah. Salah satu bentuk akuntabilitas yaitu dengan adanya laporan

kinerja yang memuat hasil kerja suatu instansi pemerintahan. Pengukuran kinerja merupakan suatu sistem untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga sasaran, antara lain :

- 1) Sasaran pengukuran kinerja bertujuan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
Ukuran kinerja dimaksudkan dalam membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- 2) Sasaran ukuran kinerja bertujuan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Sasaran ukuran kinerja merupakan bentuk dalam mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Laporan kinerja selain menjadi bahan penilaian suatu kinerja instansi pemerintahan juga bisa menjadi bahan evaluasi suatu instansi pemerintahan untuk selanjutnya dapat melakukan penyelenggaraan urusan publik yang lebih baik lagi. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu peraturan yang menjadi dasar dalam pelaporan kinerja suatu instansi pemerintahan. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan SAKIP secara elektronik atau yang disebut e-SAKIP sejak tahun 2018 untuk sistem pelaporan SAKIP seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Surabaya.



Gambar 1. Tampilan Login E-SAKIP

Sumber : organisasi.surabaya.go.id/sakip

Pelaksanaan e-SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya dapat mengakses e-SAKIP melalui tautan organisasi.surabaya.go.id/sakip. Setiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya akan mendapatkan username dan password untuk login di e- SAKIP dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.



Gambar 2. Tampilan Menu E-SAKIP

Sumber : organisasi.surabaya.go.id/sakip

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat yang dipergunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan selama melaksanakan tugas organisasi, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran prestasi, dan pelaporan kinerja. Terdapat beberapa menu dalam e-SAKIP di Pemerintah Kota Surabaya yang

menunjang urusan pemerintahan di Kota Surabaya. Komponen SAKIP yang terdapat di halaman e-SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang masing-masing digunakan seluruh OPD di pemerintah Kota Surabaya dalam melaporkan kinerja masing-masing. Berikut merupakan uraian dari setiap menu yang ada di e-SAKIP Pemerintah Kota Surabaya:

1. Perencanaan Kinerja

Pada komponen perencanaan kinerja terdapat beberapa sub komponen yang menjadi pedoman perangkat daerah di pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan perencanaan sebagai berikut:

- a. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau RENSTRA (Rencana Strategi)
- b. Pohon Kinerja/Cascading
- c. IKU (Indikator Kinerja Utama)
- d. RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) atau Renja (Rencana Kerja)
- e. RKT (Rencana Kerja Tahunan)
- f. Renaksi (Rencana Aksi)
- g. Probis (Proposal Bisnis)
- h. Perkin (Perjanjian Kinerja)
- i. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
- j. Pedoman Teknis Perencanaan

2. Pengukuran Kinerja

Pada komponen pengukuran kinerja terdapat beberapa sub komponen yang menjadi alat pengukuran kinerja di perangkat daerah pemerintah Kota Surabaya yang meliputi:

- a. Monev TSPK (Monitoring dan Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan)
- b. Monev Eperformance
- c. Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen pelaporan kinerja hanya terdapat satu sub komponen yaitu e-LKj atau Laporan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

4. Evaluasi Kinerja

Pada komponen evaluasi kinerja terdapat beberapa sub komponen yang dapat menjadi evaluasi dalam kinerja perangkat daerah di pemerintah Kota Surabaya yang meliputi:

- a. Evaluasi Sakip
- b. Tindak Lanjut Evaluasi
- c. Pedoman Teknis Evaluasi Internal

Kecamatan Gubeng merupakan salah satu OPD di Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan kebijakan e- SAKIP untuk melaporkan hasil kinerja di Kecamatan Gubeng. Kecamatan Gubeng merupakan kecamatan yang berlokasi di pusat kota Surabaya dengan luas wilayah sekitar 7,89 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 148 ribu jiwa. Lokasi Kecamatan Gubeng yang strategis tersebut menjadikan Kecamatan Gubeng menjadi OPD yang memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyediaan layanan publik di Kota Surabaya. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang lebih baik oleh pemerintah selalu menjadi tuntutan yang banyak diharapkan masyarakat termasuk di Kecamatan Gubeng ini. Berhasil tidaknya Kecamatan Gubeng dalam menepati tuntutan yang diberikan masyarakat dapat diketahui melalui hasil evaluasi Kecamatan Gubeng. Pada tahun 2023, hasil evaluasi Kecamatan Gubeng memperoleh nilai sebesar 91,45 dengan kategori predikat AA yang artinya sangat memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang telah diupayakan oleh Kecamatan Gubeng sudah sangat memuaskan.

Salah satu hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan manajemen kinerja yaitu adanya pengukuran kinerja dengan tujuan untuk menjamin peningkatan pada pelayanan publik serta peningkatan akuntabilitas dengan mencapai output serta outcome yang diharapkan, sehingga memudahkan dalam terwujudnya organisasi yang akuntabel (Anastasia Jacobus et al.,

2023). Berdasarkan komponen SAKIP sesuai dengan Permen PAN-RB No. 12 tahun 2015 :

- a. Perencanaan
Proses penyusunan perencanaan kinerja di Kecamatan Gubeng dapat terselesaikan tepat waktu karena adanya komitmen dari para pegawai Kecamatan Gubeng.
- b. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja di Kecamatan Gubeng sudah terlaksanakan dengan baik. Kinerja dapat diukur melalui realisasi dan target yang sudah ditentukan pada awal tahun yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK).
- c. Pelaporan Kinerja
Para staff/pegawai Kecamatan Gubeng telah mengumpulkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tepat pada waktunya dan berjalan dengan baik.
- d. Evaluasi Kinerja : Hasil evaluasi LAKIP Kecamatan Gubeng Tahun 2023 memperoleh kategori “Sangat Memuaskan” yang dipengaruhi oleh adanya komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, keterlibatan para pegawai dalam melaksanakan program serta adanya sarana prasarana yang mendukung.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Gubeng
Tahun 2023

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30,00	30,00
Pengukuran Kinerja	30,00	25,50
Pelaporan Kinejra	15,00	10,95
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	25,00

Jumlah	100	91,45
--------	-----	-------

*Sumber : Laporan Hasil Evaluasi
Kinerja Kecamatan Gubeng 2023
(Diolah Penulis, 2024)*

Dari tabel hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Gubeng di Tahun 2023 menunjukkan bahwa komponen perencanaan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai maksimal sebesar 30,00 untuk nilai komponen perencanaan kinerja dan 25,00 untuk nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kemudian untuk komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar 25,50 dari nilai maksimal 30,00 untuk pengukuran kinerja dan 10,95 dari nilai maksimal 15,00 untuk pelaporan kinerja. Meskipun nilai komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja tidak mencapai nilai maksimalnya, tapi secara keseluruhan Kecamatan Gubeng memperoleh nilai 91,45 dengan kategori predikat AA atau sangat memuaskan.

Keberhasilan penerapan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Keberhasilan penerapan suatu kebijakan dapat ditentukan oleh berbagai variabel yang saling berhubungan satu sama lain ((Subarsono, 2022)). Banyak ahli yang memberikan pandangan akan variabel- variabel yang menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Menurut pandangan Edward III, penerapan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel berikut: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Komunikasi, secara efektif memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan penerapan e-SAKIP.

Komunikasi memiliki peranan penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu program. Dalam konteks implementasi e-SAKIP, pemerintah telah

melakukan berbagai upaya komunikasi kepada para pelaksana kebijakan. Komunikasi merupakan proses di mana seseorang menyampaikan informasi atau gagasan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Tujuan dari komunikasi yaitu dapat berupa untuk memberikan informasi, untuk mempengaruhi pandangan, untuk mengubah sikap, atau bahkan sebagai upaya dalam mengubah perilaku penerima pesan. Komunikasi melibatkan penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu berupa pemahaman informasi yang sama, perubahan sikap, maupun perubahan perilaku pada penerima pesan.

Salah satu kegiatan dalam implementasi kebijakan yang sangat memerlukan komunikasi yaitu kegiatan koordinasi. Semua tahapan dalam kebijakan publik memerlukan kegiatan koordinasi untuk dapat menyelaraskan program atau kebijakan dengan tujuan dan sasaran. Koordinasi juga sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan sebab dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik ditentukan oleh komunikasi yang baik. Koordinasi dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain. Maka dari itu, setiap implementasi kebijakan perlu koordinasi dan komunikasi yang baik antar aktornya.

Keberhasilan implementasi e- SAKIP di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tidak terlepas dari dukungan komunikasi yang baik antar aktor kebijakan. Komunikasi dan koordinasi mempunyai peran yang penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pekerjaan sebab itu dibutuhkan peningkatan koordinasi dalam upaya menyatukan pemahaman para aktor yang mengimplementasikan e-SAKIP (Hendrik Latief et al., 2023). Di Kecamatan Gubeng, implementasi e-SAKIP berjalan dengan baik melalui komunikasi serta koordinasi yang dilakukan oleh aktor kebijakan yang terlibat

dalam implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng. Sekretaris Kecamatan Gubeng, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan staff atau pegawai di Kecamatan Gubeng melakukan komunikasi yang baik selama proses koordinasi dalam implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng. Kerja sama dalam upaya berbagi informasi antara kasubag perencanaan dan operator dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran kebijakan (Sahoming et al., 2019).

Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pegawai yang memiliki kewenangan dalam implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng merupakan bentuk keberhasilan kerjasama dalam menyukseskan implementasi e-SAKIP. Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antar pegawai Kecamatan Gubeng dalam proses pengumpulan data untuk melengkapi dokumen SAKIP juga berjalan dengan baik sehingga diperoleh nilai SAKIP Kecamatan Gubeng Tahun 2024 sebesar 91,45 dengan predikat AA. Hasil penilaian SAKIP Kecamatan Gubeng di Tahun 2024 sudah memenuhi target yang ada di Perjanjian Kinerja APBD Kecamatan Gubeng di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Gubeng telah berhasil memenuhi target serta memiliki kinerja yang bagus selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melayani masyarakat di kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja APBD Kecamatan Gubeng 2024

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Penyelesaian Keluhan Masyarakat	100%
2	Persentase Kampung Unggulan Aktif	16,67%
3	Nilai SAKIP Kecamatan Gubeng	90,91%
4	Nilai Reformasi Kecamatan Gubeng	3,36

Sumber : Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2024 Kecamatan Gubeng (Diolah Penulis, 2024)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan e-SAKIP tidak hanya melibatkan internal Kecamatan Gubeng tapi juga aktor lain seperti Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Komunikasi antar Kecamatan Gubeng dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya berjalan dengan baik. Adanya reformasi birokrasi ke e-SAKIP menjadikan proses implementasi SAKIP di perangkat daerah lebih efektif dan efisien. E-SAKIP merupakan jembatan untuk seluruh OPD Kota Surabaya dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam proses pelaporan kinerja instansi. Sebelum melaporkan kinerja perangkat daerah ke pemerintah pusat, dokumen laporan kinerja milik perangkat daerah di Kota Surabaya melewati tahap review oleh Bagian Organisasi. Adanya e-SAKIP dapat mempermudah komunikasi antar setiap OPD di Kota Surabaya dengan Bagian Organisasi dalam hal koordinasi mengenai dokumen kinerja mulai dari perencanaan dan pelaporan yang merupakan wujud dari SAKIP.

Sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia dan finansial yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pengimplementasian e-SAKIP.

Sumber daya menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penerapan suatu kebijakan. Sumber daya yang dapat mendukung berhasilnya penerapan kebijakan meliputi sumber daya manusia yaitu implementator kebijakan dan sumber daya finansial yang menunjang proses penerapan program atau kebijakan. George C. Edward III dalam (Sahoming et al., 2019), menjelaskan bahwa setiap kebijakan atau program harus mendapat dukungan dari sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Aktor-aktor yang terlibat dalam suatu implementasi sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan sebab para aktor inilah yang memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan. Kesalahan dalam memilih aktor kebijakan

dapat menghambat dalam mencapai tujuan. Sumber daya finansial juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng didukung adanya sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Pegawai Kecamatan Gubeng memiliki kemampuan yang baik dalam implementasi e-SAKIP. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan para pegawai Kecamatan Gubeng dalam mengoperasikan website e-SAKIP. Selain itu, sumber daya finansial juga sangat mendukung penerapan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng. Selain kemampuan pegawai Kecamatan Gubeng dalam mengoperasikan website e-SAKIP, terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menunjang pengoperasian website e-SAKIP di Kecamatan Gubeng. Meskipun anggaran yang diadakan untuk penerapan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng tidak terlalu besar tapi sudah sangat mendukung keberhasilan implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng sehingga dalam terlaksana secara efektif dan efisien.



Gambar 3. Webstie E-SAKIP 2024

Sumber : organisasi.surabaya.go.id/sakip

Diposisi, mencakup karakteritik dari implementator kebijakan pengaruhi keberhasilan penerapan e-SAKIP.

Disposisi dalam implementasi kebijakan merujuk pada karakteristik implementator kebijakan atau program. Karakter aktor kebijakan sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau program (Sahoming et al., 2019). Kejujuran, komitmen dan demokrasi merupakan karakter aktor kebijakan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Karakter tersebut dapat membantu ketika menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau program. Karakter yang dimiliki oleh implementator kebijakan juga harus selaras dengan pembuat kebijakan untuk menunjang efektifitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan. Proses penerapan kebijakan atau program akan berjalan tidak efektif jika implementator kebijakan dan pembuat kebijakan memiliki sikap maupun perspektif yang berbeda (Subarsono, 2022).

Pada implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng, aktor yang terlibat memiliki karakteristik yang cukup baik. Dalam proses pengerjaan dokumen-dokumen SAKIP dilandaskan dengan kondisi nyatanya di lapangan. Selain itu, data-data yang digunakan sebagai laporan kinerja di e-SAKIP merupakan data yang dihasilkan dari kinerja Kecamatan Gubeng. Para pegawai Kecamatan Gubeng yang memiliki kewenangan dalam pengerjaan SAKIP memiliki komitmen yang baik dalam menyelesaikannya. Terbukti bahwa pengerjaan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng dapat terselesaikan tepat pada waktunya karena adanya komitmen dari para pegawai yang berwenang. Banyaknya beban tugas para pegawai terkadang membuat para pegawai kewalahan sehingga

mengumpulkan tugasnya seringkali tidak tepat waktu (Radinda & Saleh, 2021). Tapi hal ini tidak berlaku di Kecamatan Gubeng karena para pegawainya memiliki komitmen yang tinggi. Meskipun banyak beban tugas yang dilimpahkan, tapi para pegawai Kecamatan Gubeng tetap akan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Sikap demokrasi juga mendukung implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng. Para pegawai Kecamatan Gubeng yang memiliki kewenangan dalam pengerjaan SAKIP tidak

serta merta mengerjakannya. Mereka juga mempertimbangkan segala aspirasi dan usulan yang ada untuk menunjang pengerjaan dokumen-dokumen SAKIP.

Struktur Birokrasi, mekanisme dan struktur organisasi menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi e-SAKIP.

Struktur birokrasi dalam penerapan kebijakan meliputi mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri (Sahoming et al., 2019). Mekanisme dalam peneparan suatu program menjadi hal yang penting demi mendukung keberhasilan dalam mencapai sasaran program. Struktur organisasi juga menjadi faktor penting dalam penerapan sebuah kebijakan atau program. Aktor-aktor yang terlibat pada implementasi kebijakan berpedoman pada struktur birokrasi yang ada pada suatu instansi. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) (Subarsono, 2022). SOP menjadi dasar penting dalam menjalankan suatu program atau kebijakan.

Pada implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng terdapat mekanisme yang cukup rinci dan jelas. E-SAKIP merupakan sebuah website yang digunakan sebagai wadah pelaporan dokumen-dokumen SAKIP mulai dari dokumen perencanaan hingga dokumen pelaporan kepada Bagian Organisasi sekretariat Daerah Kota Surabaya. Adanya e-SAKIP ini meringkas banyaknya wadah dalam pelaporan dokumen ke Bagian Organisasi menjadi satu pintu sehingga mekanismenya menjadi lebih mudah dan praktis. Reformasi birokrasi terhadap SAKIP di Pemerintah Kota Surabaya menjadikan proses penyelenggaraan urusan publik di Kota Surabaya lebih efektif dan efisien dengan adanya e-SAKIP yang menjadi wadah seluruh dokumen perencanaan maupun pelaporan milik perangkat daerah Kota Surabaya. Selain itu, struktur organisasi Kecamatan Gubeng juga mempengaruhi keberhasilan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng. Terdapat beberapa jabatan yang terlibat dalam implementasi e-SAKIP di Kecamatan Gubeng diantaranya sebagai berikut:

1. Sekretaris Kecamatan Gubeng; memiliki tanggung jawab dalam pengerjaan e-SAKIP. Sekretaris Kecamatan Gubeng merupakan aktor pertama di tingkat perangkat daerah yang memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan e-SAKIP di tingkat kecamatan. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab pengerjaan e-SAKIP merupakan tanggung jawab Sekretaris Kecamatan Gubeng.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gubeng; memiliki tanggung jawab dalam melengkapi dan mengumpulkan data-data e-SAKIP di Kecamatan Gubeng.
3. Staff/Pegawai Kecamatan Gubeng; memiliki tugas dalam mengerjakan e-SAKIP. Staff atau pegawai ini merupakan tingkatan paling bawah yang harus mengerjakan e-SAKIP. Pengerjaan e-SAKIP dilakukan oleh staff atau pegawai dengan mengkoordinasikan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian serta kepada Sekretaris Kecamatan.

Terjalin koordinasi yang hierarki dalam pelaksanaan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng. Hal ini dikarenakan adanya struktur birokrasi yang jelas dalam menerjemahkan tugas dan fungsi masing-masing jabatan yang ada di Kecamatan Gubeng. Namun, pada penerapan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng belum memiliki SOP khusus. Meski demikian, penerapan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng dapat dikatakan berhasil diimplementasikan dengan baik.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa Penerapan SAKIP yang diterapkan oleh Kecamatan Gubeng menunjukkan hasil kinerja yang baik dari Kecamatan Gubeng. Tingkat kinerja ASN yang baik akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Surabaya. Hasil positif yang diberikan dari hasil kinerja ASN merupakan manfaat yang akan muncul di publik (Riyadi & Yulianto, 2014). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan misi suatu organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja yang dimaksudkan merupakan hasil dari suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Untuk melakukan pengukuran kinerja di instansi pemerintahan, pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama dalam menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar dalam penilaian kinerja. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai (Engkus et al., 2023).

Penerapan sistem E-SAKIP di Kecamatan Gubeng tentunya dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan pelaksanaan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng tentunya didukung oleh banyak faktor. Faktor pendukung pada pelaksanaan kebijakan cukup beragam, dalam pelaksanaan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng didukung beberapa faktor sebagai berikut ini:

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan yaitu Camat Kecamatan Gubeng dalam pelaksanaan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng.
- b. Ketersediaan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai di Kecamatan Gubeng dalam pengerjaan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng.
- c. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai pada website e-SAKIP sangat mendukung pelaksanaan SAKIP di Kecamatan Gubeng.

- d. Adanya dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan e-SAKIP di Pemerintah Kota Surabaya salah satunya yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan selain dapat menghambat keberhasilan kebijakan juga dapat menghambat produktivitas instansi pemerintah dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Pada pelaksanaan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng terhambat karena jumlah sumber daya manusia atau aparturnya yang terbatas. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia atau aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dapat menghambat efektifitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah. Sehingga dapat mempengaruhi hasil penilaian kinerja dan SAKIP. Hal ini perlu diperhatikan terutama dalam penentuan jumlah sumber daya manusia atau aparatur yang ada di instansi pemerintah sehingga kinerja pemerintah dapat lebih optimal dan memberikan kebermanfaat pada publik.

SIMPULAN

Penerapan e-SAKIP menjadi salah satu bentuk reformasi birokrasi dalam meningkatkan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintahan. Akuntabilitas pemerintah menjadi penunjang untuk mencapai good governance di Pemerintahan Indonesia. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Gubeng pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Keberhasilan Kecamatan Gubeng dalam menerapkan e-SAKIP didukung berbagai variabel seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi.

1. Komunikasi; terjalin komunikasi yang ng.baik antara aktor yang menerapkan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng. Selain itu, komunikasi dan koordinasi Kecamatan Gubeng dengan Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya juga berjalan dengan baik.

2. Sumberdaya; terdapat sumberdaya manusia dan finansial yang mendukung keberhasilan penerapan e-SAKIP di Kecamatan Gubeng. Kompetensi pegawai dalam mengoperasikan e-SAKIP dan dukungan sarana prasana menjadi kunci suksesnya e-SAKIP di Kecamatan Gubeng.
3. Disposisi; pegawai Kecamatan Gubeng yang berwenang dalam implementasi e-SAKIP memiliki komitmen yang tinggi sehingga pengerjaan SAKIP dalam terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Struktur organisasi; perubahan SAKIP menjadi e-SAKIP mempermudah implementasi kebijakan SAKIP di Kecamatan Gubeng. Selain itu, struktur organisasi yang jelas juga mendukung secara hierarki tanggung jawab e-SAKIP di Kecamatan Gubeng.

DAFTAR PUSATA

- Anastasia Jacobus, D., Pangemanan, F., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi Kebijakan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-Sakip) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Manado. *EKSEKUTIF: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 3(1).
- Engkus, Zahra, A., Januarti Yusmi, A., & Maulida Insani, D. (2023). EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2). <http://jurnaldialektika.com/>
- Hendrik Latief, Syachrumsyah Asri, & Agus Santosa. (2023). AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PASER. *Journal Publicuho*, 5(4), 1367–1376. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.83>
- Lestari, S., & Valiant Salomo, R. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *Jurnal MODERAT*, 8(4).
- Pebriani Wahyu, F., Aditiya Azhar Pratama, A., Tri Ningtiyas, A., & Ayu Fauziah, A. (2023). ANALISIS PERAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA PENGADILAN NEGERI UNAAHA SULAWESI TENGGARA. *DISTINGSI: JOURNAL OF DIGITAL SOCIETY*, 2(1), 9–18.
- Pratiwi, S., Martono, S., & Mahmud, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Perguruan Tinggi Negeri. *Business and Economic Analysis Journal*, 2(2), 108–120. <https://doi.org/10.15294/beaj.v2i2.37790>
- Radinda, R., & Saleh, S. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Jaringan Internet E-SAKIP Terhadap Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung). *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1029–1034.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN JUAL BELI, FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Accounting Analysis Journal*, 466(4).

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aj>

Sahoming, P., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Implementasi Kebijakan E-SAKIP Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.

Saputra, H., Pradana, F., & Priyambadha, B. (2017). Pengembangan Elektronik-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Dinas Perindustrian Kota Malang. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 1(10), 1167–1175. <http://j-ptiik.ub.ac.id>

Subarsono, A. (2022). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. PUSTAKA PELAJAR.